

DAFATAR PUSTAKA

A. Buku

Waty Suwarty Haryono, *Hukum Lingkungan*,(Jakarta : Universitas Islam Jakarta,2011).

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996),hlm.150

Bawengan, Gerson, *Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek*,(Jakarta : Paradnya Paramita, 1979),hlm.45

Marpaung, Leden, *Proses penanganan Pekara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995),hlm.80

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Hukum Pidana*,(Bandung : Alumni, 1992).

Saleh, Roeslan, *Tentang-tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*,(Jakarta : BPHN, 1984),hlm.78

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni,1981).

Azhary, *Negara Hukum Indonesia*,(Jakarta : UI-Press,1995).

Bagir Manan, ed, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*,(Bandung : Universitas Padjajaran,1990),hlm.196

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Soemardi.(Jakarta : Rindi Press,1995).

Irawan Soedjito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*,(Jakarta : Bina Aksara,1983),hlm160-195

Irawan Soedjito, *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*,(Jakarta : Rineka Cipta,1990).

Marbun,SF dan Moh. Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*,(Yogyakarta : Liberty,1987),hlm.104

Marbun,SF dan Moh. Mahfud, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang baik dan Bersih di Indonesia*, (Bandung : Universitas Padjajaran,2001).

Markus Lukman, *Eksistensi Peraturan kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*,(Bandung : Universitas Padjajaran,1996).

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Bandung : Alumni,2000).

Philipus M.Hadjon, *Penagntar Hukum Perizinan*, (Surabaya : Yuridika,1993),hlm.67

Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAMPLA)*,(Jakarta : Rajawali,1989).

Sri Soemantri, *Bungan Rumpai Hukum Tata Negara Indonesia*,(Bandung : Alumni,1992).

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*,(Bandung : Citra Aditya Bakti,1983).

Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*,(Surabaya : Universitas Airlangga,1990).

Utrecht, E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*,(Jakarta : Ichtiar,1957).

Halid Muhammad, *Mereka yang Dipinggirkan Sengketa Tambang Galian C*,(Jakrata : Jaringan Advokasi Tambang,2002).

Siti Maimunah, **Tambang dan Penghancuran Lingkungan**,(Jakarta : Jaringan Advokasi Tambang,2003).

B. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 tahun 2009.

Indonesia, *Undang –Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.23 Tahun 1997, UU No.23 tahun 1997, LN No.68 tahun 1997, TLN NO. 3669.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lingkungan Sektor*, UU No.4 Tahun 1982.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No.4 tahun 2009.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, UU No.33 tahun 2004.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.4 tahun 1982.

Indonesia, *Undang-Undang Anggaran Negara*, UU No.33 tahun 1999.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Sumber Daya Air*, UU No. 32 tahun 2009.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012

*tentang Penetapan Bentang Alam Karst.*Jakarta, 2012.

B. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah tentang Izin Lingkungan, PP No. 27 tahun 2012.

Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, PP No. 4 tahun 2001.

Peraturan pemerintah tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan, PP No. 54 Tahun 2000.

Peraturan pemerintah tentang Pencemaran Udara, PP No. 41 tahun 1999.

Peraturan pemerintah tentang jenis dan Tarif Atas PNPB pada kementerian Lingkungan Hidup, PP No. 52 tahun 2008.

Peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP No. 42 tahun 2008.

Peraturan pemerintah tentang Air Tanah, PP No. 43 tahun 2008.

Peraturan pemerintah tentang Dewan Sumber Daya Air, PP No.12 tahun 2008.

Departemen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Permen Lingkungan Hidup No.7 tahun 2010.

Departemen ESDM, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Bentang Alam Karst, Permen ESDM No. 17 tahun 2012.

D. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Penetapan Bentang Alam Karst, Permen ESDM No.17 tahun 2012.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Sertifikasi kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup , Permen LH No 07 tahun 2010.

E. Internet

“ Pertambangan Batu Kapur di Kawasan Citeureup Bogor .”Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, www.bappenas.go.id. (diakses (10 Juni 2013, jam 09:00).

“ Tata Letak Khusus Bidang Pertambangan Kapur di Kawasan Citeureup Bogor.” Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, www.bappenas.go.id. (diakses (11 Juni 2013, jam 15:20).

“ Efektifitas Pertambangan Kapur di Dalam Masyarakat.” Pemerintah Kabupaten Bogor. www.Pemkabbogor.go.id. (diakses(20 Desember 2012,jam 13.00).

“Dampak Pertambangan Kapur Pada Masyarakat Sekitar.”Penelusuran media online Google. www.wordpress.com.(diakses(11 Desember 2012,jam 16.00).

“ PT. INDOCEMENT.” Perusahaan Industri Indosement. www.Indocement.com (diakses(9 Desember 2012,jam 17.00).

“ Pentingnya Fungsi Lingkungan Bagi kehidupan.” Penelusuran Media online Google. www.Wordpress.com. (diakses(13 Desember 2012,jam 20.18)